



Sistem FWA Dikaji, Perkuat Reformasi Birokrasi

KOTA, Joglo Jateng – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Kota Yogyakarta bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan FGD Sistem Kerja, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan *Flexible Working Arrangements* (FWA) di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Senin (6/3). Pemkot Yogyakarta ingin mencontoh Pemprov Jabar yang sudah menerapkan sistem kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada In-

stansi Pemerintah untuk Penyerahan Birokrasi. "Ternyata sejak 2021 Jabar sudah menerapkan sistem kerja yang baru. Di mana mereka sudah tidak ada lagi eselon 3 dan eselon 4. Ini yang akan kita adopsi ke Pemkot Yogyakarta, jadi kita punya *best making* dari Provinsi Jabar dan kita sudah mempersiapkan regulasinya," jelas Kepala Bagian Organisasi, Patricia Heny Dian Anitasari. Menurutnya, penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pe-



Semoga ke depan dengan adanya sistem kerja yang baru dapat mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Aman Yuradijaya
Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

merintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE melalui beberapa tahapan, yakni Penyerahan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan

Penyesuaian Sistem Kerja. "Kita tinggal langkah menunggu regulasi, sembari menunggu kita harus *prepare* agar waktu pelaksanaan tidak ada kendala di lapangan. Yang menarik sistem

kerja di tempat kerja mereka itu sudah dibuat satu meja, bukan untuk meja satu orang tetapi meja bersama, sehingga siapa pun bisa duduk di situ dan dibuat benar-benar nyaman," jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuradijaya berharap, mekanisme sistem kerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 7 dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi dan akuntabel. ■ Baca SISTEM... Hal II



SUASANA: FGD Sistem Kerja, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan FWA di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Senin (6/3).

Sistem FWA Dikaji, Perkuat Reformasi Birokrasi

sambungan dari hal Joglo Jogja

Selama pandemi Covid-19, Pemkot Yogyakarta menerapkan *Work from Home* (WFH) bagi pegawai ASN. Penerapan WFH berjalan cukup baik karena telah didukung oleh *Jogja Smart Service* (JSS) dan

pemanfaatan teknologi lainnya seperti *zoom meeting*, sehingga tujuan organisasi tetap tercapai. "Semoga ke depan dengan adanya sistem kerja yang baru dapat mewujudkan proses kerja yang

efektif dan efisien, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," ujarnya. Analisis Kebijakan Ahli Madya Pemprov Jabar Purnomo Yustianto mengungkapkan, Pemprov

Jabar ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *Pilot Project* penerapan sistem kerja dan menerapkan mekanisme kerja *Team of Teams* (ToTs) untuk

penyederhanaan birokrasi. "Dengan sistem kerja yang ada, hingga saat ini kita memberikan batasan, namun tetap memperhatikan kinerja dari sumber daya manusia yang ada. Sehingga

proses kinerja selalu baik dan wajib transparan," katanya. Selain itu, Pemprov Jabar juga menerapkan FWA sebagai strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien yang didukung

oleh *SIM/e-Government*, "Sistem *Work From Anywhere* (WFA) bagi ASN sebagai sistem kerja yang humanis dan dinamis sehingga dapat menjawab tantangan WFA di Pemprov Jabar saat ini," ujarnya. (hms/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005